



## Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Kawasan Danum Bahandang Kota Palangka Raya

Nurlaila<sup>1\*</sup>, Ahmad Syahrul Hendrawan<sup>2</sup>, Fitriana Selvia<sup>3</sup>, Imanuel Jaya<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangka Raya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [nurlaila9987@gmail.com](mailto:nurlaila9987@gmail.com)

**Abstract.** *Community participation around tourist destinations is one of the key factors in achieving sustainable conservation-based tourism management. This study aims to analyze the involvement of local communities in the management of sustainable nature tourism in Danum Bahandang, Palangka Raya City. The study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews with relevant informants, field observations, and documentation studies of various relevant sources. The findings indicate that the level of community involvement in managing the tourist destination remains suboptimal. Local residents only participate in certain tourism activities and have not been actively involved in the planning, management, and decision-making processes related to destination development. This condition shows that the role of the community is still limited and does not yet fully reflect participatory tourism management. Based on Arnstein's ladder of participation theory, the level of community participation falls within the category of \*tokenism\*. Therefore, greater efforts are needed to enhance community involvement so that sustainable tourism management can be implemented more effectively while supporting environmental sustainability and improving the welfare of local communities.*

**Keywords:** *Arnstein's Theory; Community Participation; Danum Bahandang; Sustainable Ecotourism; Tourism Management.*

**Abstrak.** Partisipasi masyarakat di sekitar destinasi wisata merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata berbasis konservasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata alam berkelanjutan di Danum Bahandang, Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut masih belum optimal. Masyarakat hanya berpartisipasi dalam beberapa aktivitas wisata tertentu dan belum terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran masyarakat masih terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan wisata yang partisipatif. Berdasarkan teori tangga partisipasi Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori \*tokenism\*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pelibatan masyarakat secara lebih aktif agar pengelolaan wisata berkelanjutan dapat berjalan secara optimal serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

**Kata kunci:** Danum Bahandang; Ekowisata Berkelanjutan; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Wisata; Teori Arnstein.

### 1. LATAR BELAKANG

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata di Indonesia memperoleh legitimasi yang kuat melalui berbagai perangkat hukum nasional. Salah satu dasar hukum yang secara eksplisit mengatur hal tersebut adalah UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada Pasal 19 regulasi tersebut ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak berperan serta dalam proses pembangunan kepariwisataan”. Ketentuan tersebut merefleksikan pengakuan negara terhadap pentingnya kontribusi publik dalam pembangunan sektor wisata. Dengan demikian, warga tidak semata-mata dipandang sebagai pihak yang menikmati manfaat ekonomi maupun sosial dari aktivitas pariwisata, melainkan sebagai aktor yang memiliki hak,

peran, dan tanggung jawab untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta upaya menjaga keberlanjutan pengembangan destinasi wisata.

Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam juga memperoleh dasar hukum melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk menyampaikan usulan maupun masukan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pengaturan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan publik tidak hanya ditempatkan sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai bagian penting dari tata kelola lingkungan yang demokratis. Dalam konteks pengelolaan ekowisata, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi warga untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, serta proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, sehingga keberlanjutan kawasan wisata dapat terjaga secara lebih efektif dan inklusif.

Dari perspektif teoretis, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipahami melalui konsep *Ladder of Citizen Participation* yang diperkenalkan oleh Sherry R. Arnstein. Kerangka tersebut menggambarkan partisipasi publik sebagai suatu spektrum yang terdiri atas beberapa jenjang, mulai dari keterlibatan yang bersifat simbolis dan terbatas hingga tingkat tertinggi yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kewenangan substantif dalam menentukan arah kebijakan. Melalui pendekatan ini, partisipasi tidak hanya dipandang dari keberadaan masyarakat dalam suatu kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana mereka memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan dan pengendalian atas program yang dijalankan (Arnstein, 1969). Dalam pengelolaan ekowisata, konsep tersebut menjadi landasan yang relevan untuk menilai kualitas keterlibatan warga pada berbagai tahapan pengelolaan destinasi. Penggunaan teori ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi apakah keterlibatan yang terjadi sebatas pemberian informasi dan konsultasi, atau telah berkembang menuju bentuk kemitraan yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata yang didukung oleh keberadaan hutan tropis, keanekaragaman hayati, serta ekosistem rawa gambut yang khas. Salah satu kawasan yang memiliki potensi tersebut adalah Kota Palangka Raya, yang dikenal dengan bentang alam gambutnya. Salah satu destinasi yang berkembang adalah Danum Bahandang, yang memanfaatkan karakteristik air gambut berwarna kemerahan sebagai daya tarik utama. Keunikan ini memberikan nilai estetika sekaligus nilai ekologis yang

tinggi, serta berpotensi sebagai sarana edukasi lingkungan terkait pentingnya pelestarian ekosistem gambut.

Walaupun memiliki sumber daya alam yang berpotensi mendukung pengembangan wisata berbasis konservasi, pengelolaan Danum Bahandang masih dihadapkan pada berbagai kendala yang berkaitan dengan keterlibatan warga setempat. Selama ini, penduduk di sekitar lokasi telah berkontribusi melalui berbagai aktivitas pendukung, seperti menjaga kebersihan area wisata, menyediakan sarana sederhana bagi pengunjung, serta mengelola usaha skala kecil yang menunjang kebutuhan wisatawan. Kehadiran berbagai bentuk kontribusi tersebut mencerminkan adanya peran aktif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan aktivitas wisata sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi rumah tangga di sekitar kawasan. Namun demikian, partisipasi yang terjadi masih cenderung terkonsentrasi pada aspek operasional dan pelayanan lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterlibatan warga lebih banyak diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan wisata sehari-hari dibandingkan dengan peran yang bersifat strategis. Meskipun demikian, kontribusi tersebut tetap memiliki arti penting karena membantu menjaga kualitas lingkungan destinasi, meningkatkan kenyamanan pengunjung, serta menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh komunitas di wilayah sekitar.

Meskipun demikian, keterlibatan warga masih didominasi oleh aktivitas yang bersifat implementatif. Ruang partisipasi pada tahapan yang lebih strategis, seperti perencanaan program, pengelolaan destinasi, serta proses perumusan keputusan, masih belum berkembang secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum memperoleh kesempatan yang memadai untuk terlibat dalam penentuan arah pengembangan kawasan wisata, sehingga perannya masih lebih banyak berfokus pada pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang oleh pihak lain. Fenomena tersebut merefleksikan adanya kesenjangan antara kontribusi operasional yang telah diberikan dengan tingkat pengaruh masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan destinasi. Dalam perspektif partisipasi pembangunan, keterlibatan yang terbatas pada tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa posisi warga belum sepenuhnya bergeser menjadi mitra utama dalam tata kelola kawasan wisata berbasis konservasi. Akibatnya, aspirasi, kebutuhan, serta pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas setempat belum terakomodasi secara maksimal dalam proses pengembangan destinasi. Apabila situasi ini terus berlanjut, upaya mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan berpotensi menghadapi berbagai hambatan. Keterlibatan yang belum menyentuh seluruh tahapan pengelolaan dapat mengurangi rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sekaligus membatasi efektivitas pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di samping berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi tersebut, ketersediaan kajian ilmiah yang secara khusus mengulas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Danum Bahandang masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman akademik mengenai dinamika partisipasi warga di kawasan tersebut belum berkembang secara memadai, terutama dalam menjelaskan bentuk, tingkat, serta kualitas keterlibatan yang terjadi pada berbagai tahapan pengelolaan destinasi. Keterbatasan literatur yang tersedia mengindikasikan adanya celah penelitian yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Kekosongan kajian tersebut menjadi penting untuk diisi karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Melalui penelitian yang lebih mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana warga terlibat dalam proses pengelolaan, faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan tersebut, serta implikasinya terhadap keberlanjutan kawasan wisata. Atas dasar pertimbangan tersebut, kajian ini dilakukan untuk memperkaya khazanah akademik sekaligus memberikan pemahaman empiris mengenai kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Danum Bahandang. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan destinasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Berangkat dari uraian tersebut, pelaksanaan kajian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk mengkaji secara mendalam keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Danum Bahandang, Kota Palangka Raya. Kajian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peran warga diwujudkan dalam berbagai tahapan pengelolaan destinasi, sekaligus mengidentifikasi kualitas keterlibatan yang terbentuk dalam praktik pengelolaan di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh terkait bentuk partisipasi yang berkembang, tingkat keterlibatan masyarakat, serta berbagai faktor yang mendorong maupun menghambat kontribusi warga dalam pengelolaan kawasan wisata berbasis konservasi. Pemahaman tersebut menjadi penting karena dapat memberikan landasan empiris dalam merancang strategi pengelolaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Ekowisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi. Konsep ini berkembang sebagai alternatif pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada

peningkatan kunjungan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek konservasi serta pemberdayaan komunitas lokal dalam setiap proses pengelolaannya. Seiring meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan, konsep ekowisata berkelanjutan muncul sebagai pendekatan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa pemanfaatan potensi wisata alam tidak menimbulkan kerusakan ekologis maupun perubahan sosial budaya yang merugikan masyarakat setempat. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan dari aktivitas wisata dapat terus dinikmati oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang tanpa mengurangi kualitas sumber daya yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

Meskipun keterlibatan masyarakat diakui sebagai elemen penting dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan, dalam praktiknya ruang partisipasi yang tersedia sering kali belum mencakup seluruh tahapan pengelolaan. Warga umumnya belum memperoleh kesempatan yang memadai untuk terlibat dalam proses perencanaan maupun penentuan kebijakan, sehingga kontribusi yang diberikan masih terkonsentrasi pada aktivitas tertentu dan belum menyentuh aspek yang bersifat strategis. Kondisi ini menyebabkan peran masyarakat lebih banyak muncul sebagai pelaksana program dibandingkan sebagai pihak yang turut menentukan arah pengembangan kawasan wisata. Fenomena tersebut sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Nuraisyah et al. (2022), yang mengungkapkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masih relatif rendah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Akibatnya, kontribusi warga pada tahap perencanaan maupun implementasi program belum berkembang secara optimal.

Di samping keterbatasan ruang keterlibatan yang tersedia, tingkat partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Beberapa aspek yang sering menjadi hambatan antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai program yang dijalankan, tingkat pendidikan yang beragam, serta tingginya intensitas aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari yang harus dipenuhi oleh warga. Berbagai kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan maupun pengelolaan kawasan wisata. Kecenderungan tersebut menggambarkan bahwa partisipasi tidak hanya ditentukan oleh adanya kesempatan untuk terlibat, tetapi juga oleh kapasitas individu dan komunitas dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Keterbatasan akses terhadap informasi dan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berkontribusi secara lebih luas. Di

sisi lain, tuntutan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi sering kali membuat warga lebih memprioritaskan aktivitas yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup dibandingkan mengikuti berbagai kegiatan perencanaan atau musyawarah pembangunan. Akibatnya, keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan belum dapat berlangsung secara optimal. Kondisi ini berpotensi membatasi kontribusi warga dalam penyampaian gagasan, pengawasan program, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Berbeda dengan temuan tersebut, kajian yang dilakukan oleh Bobsuni (2021) memperlihatkan tingkat keterlibatan masyarakat yang relatif tinggi dalam pengelolaan destinasi wisata. Kontribusi warga tidak hanya diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan fisik, tetapi juga mencakup pemberian gagasan, dukungan material, pemanfaatan keterampilan, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial yang mendukung pengembangan kawasan wisata. Keragaman bentuk kontribusi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pengelolaan destinasi. Perbedaan temuan antara berbagai penelitian mengindikasikan bahwa kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh mekanisme pelibatan yang diterapkan serta dukungan kelembagaan yang tersedia. Kehadiran sistem yang mampu mengakomodasi aspirasi warga, memberikan kesempatan untuk terlibat, serta menciptakan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung menjadi faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan kawasan pariwisata. Namun, di beberapa daerah, masyarakat lokal justru menjadi aktor utama yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kawasan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum merata dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses pengelolaan ekowisata.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Untuk memahami fenomena keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, kajian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh Sherry R. Arnstein sebagai landasan analitis. Kerangka tersebut dipilih karena mampu menjelaskan tidak hanya keberadaan masyarakat dalam suatu program pembangunan, tetapi juga menggambarkan tingkat pengaruh yang dimiliki masyarakat terhadap proses perumusan dan penetapan kebijakan. Dengan demikian, partisipasi dipahami sebagai konsep yang lebih luas daripada sekadar kehadiran atau keterlibatan administratif, melainkan berkaitan dengan distribusi

kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Menurut Arnstein (1969), kualitas partisipasi dapat diukur berdasarkan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memengaruhi arah dan pelaksanaan suatu program pembangunan. Semakin besar akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, semakin tinggi pula tingkat partisipasi yang tercermin. Sebaliknya, keterlibatan yang hanya bersifat simbolis menunjukkan bahwa masyarakat belum memperoleh posisi yang kuat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Melalui konsep *Ladder of Citizen Participation*, Arnstein (1969) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam delapan jenjang yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori utama.

- a. *Non-participation* terdiri atas *manipulation* dan *therapy*. Pada kategori ini, keterlibatan masyarakat masih bersifat semu karena warga tidak memperoleh kesempatan untuk memengaruhi keputusan yang diambil. Kehadiran mereka lebih diarahkan sebagai penerima kebijakan atau program yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pihak pengelola. Dengan kata lain, masyarakat ditempatkan sebagai objek pelaksanaan, bukan sebagai pihak yang memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan.
- b. *Tokenism* mencakup tingkatan *informing*, *consultation*, dan *placation*. Pada tahap ini, masyarakat mulai memperoleh ruang untuk berinteraksi dengan pengambil keputusan, misalnya melalui penyampaian informasi, forum konsultasi, atau pemberian masukan terhadap program yang akan dijalankan. Meskipun demikian, kesempatan tersebut belum diikuti oleh kewenangan yang cukup untuk memengaruhi keputusan akhir. Akibatnya, keterlibatan warga masih cenderung bersifat simbolis karena aspirasi yang disampaikan belum tentu diakomodasi dalam kebijakan yang ditetapkan.
- c. *Citizen Power* terdiri atas *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*. Kategori ini merepresentasikan tingkat partisipasi yang lebih substantif karena masyarakat memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan. Hubungan yang terbangun tidak lagi bersifat satu arah, melainkan berkembang menjadi kemitraan antara masyarakat dan pengelola. Pada jenjang yang lebih tinggi, warga memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menentukan kebijakan tertentu, bahkan memiliki kendali yang dominan terhadap pengelolaan program.

Dalam kajian ini, teori partisipasi yang dikembangkan oleh Sherry R. Arnstein digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi tingkat keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di wilayah studi. Penggunaan teori tersebut memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi posisi partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat pengaruh yang dimiliki terhadap proses pengelolaan destinasi, sehingga

tidak hanya menilai keberadaan keterlibatan masyarakat, tetapi juga kualitas dan kedalaman peran yang dijalankan. Pendekatan ini menjadi penting karena tingkat partisipasi dapat bervariasi, mulai dari keterlibatan yang terbatas pada penerimaan informasi dan penyampaian pendapat hingga bentuk partisipasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan kawasan wisata. Melalui kerangka Arnstein, dapat diketahui apakah masyarakat hanya berfungsi sebagai pihak yang menerima keputusan yang telah ditetapkan, atau telah memperoleh posisi sebagai mitra yang memiliki pengaruh nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif sebagai dasar dalam proses pengkajian. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di kawasan penelitian. Melalui pendekatan kualitatif, berbagai pengalaman, persepsi, serta bentuk partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dapat dieksplorasi secara lebih komprehensif sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya. Sementara itu, penggunaan metode deskriptif diarahkan untuk menggambarkan fenomena yang menjadi fokus kajian secara rinci berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti menyajikan uraian yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan fakta yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan ekowisata Danum Bahandang, Kota Palangka Raya. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang memiliki potensi wisata berbasis alam yang terus berkembang dan menjadi salah satu destinasi yang mulai menarik perhatian pengunjung. Selain memiliki daya tarik lingkungan yang mendukung pengembangan wisata berkelanjutan, kawasan ini juga menawarkan konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara pengelolaan destinasi dan keterlibatan masyarakat setempat. Penentuan lokasi penelitian juga didasarkan pada masih terbatasnya informasi empiris mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan tersebut. Meskipun warga telah terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendukung operasional destinasi, kualitas dan tingkat keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan secara menyeluruh masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber informasi, yaitu data primer dan data sekunder. Informasi utama diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Pengumpulan informasi secara langsung tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan.

Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan beberapa teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif sekaligus meningkatkan kedalaman pemahaman terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian.

Pengolahan dan interpretasi informasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena yang diteliti secara mendalam melalui penafsiran terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari lapangan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan informasi hingga tahap penarikan kesimpulan guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan. Tahapan pengolahan informasi diawali dengan mengumpulkan seluruh temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan proses penyederhanaan serta pemilahan informasi dengan menyeleksi bagian-bagian yang relevan dengan fokus kajian. Setelah itu, informasi yang telah terorganisasi disajikan secara sistematis agar pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dapat dipahami dengan lebih jelas. Tahap akhir dilakukan melalui penafsiran terhadap temuan yang telah disusun untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi empiris di lokasi penelitian. Dalam proses interpretasi, teori partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh Arnstein (1969) digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan ekowisata. Kerangka tersebut membantu mengidentifikasi posisi partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat pengaruh yang dimiliki dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui apakah keterlibatan masyarakat masih berada pada kategori *non-participation*, telah berkembang ke tingkat *tokenism*, atau telah mencapai kategori *citizen power* yang menunjukkan adanya kewenangan dan pengaruh yang lebih besar dalam pengelolaan kawasan wisata.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi langsung di kawasan wisata Danum Bahandang, diketahui bahwa pengembangan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang cukup panjang hingga dapat berkembang dari hasil wawancara dengan pengelola kawasan, kawasan ini pada awalnya merupakan lokasi kegiatan penambangan pasir milik pribadi Firman Djuda yang kemudian tidak lagi aktif, kondisi tersebut terjadi karena munculnya penambangan pasir lain yang berada lebih dekat dengan jalan utama sehingga lebih mudah dijangkau oleh para pembeli.

Selain itu, adanya perbedaan harga yang ditawarkan oleh penambang lain juga memengaruhi menurunnya permintaan pasir dari lokasi tersebut. Akibatnya, aktivitas penambangan secara bertahap dihentikan dan kawasan tersebut tidak lagi dimanfaatkan sebagai lokasi produksi pasir. Ia menjelaskan bahwa gagasan menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata pada awalnya tidak direncanakan secara khusus, “awalnya tidak direncanakan untuk wisata, hanya iseng-iseng membuat tempat istirahat keluarga di pinggir sungai. Tapi setelah ada orang-orang yang datang dan bahkan ada yang berkemah, saya melihat ada potensi sehingga kawasan ini kemudian dibersihkan dan ditata sedikit demi sedikit.” (Firman Djuda, wawancara 2026).

Seiring waktu, kawasan yang semula hanya dimanfaatkan untuk aktivitas pribadi mulai menarik perhatian masyarakat yang datang untuk menikmati suasana alam di sekitar sungai. Melihat semakin banyaknya pengunjung yang datang, pengelola kemudian melakukan penataan kawasan secara bertahap dengan membersihkan area sungai serta menambahkan beberapa fasilitas sederhana. Firman Djuda juga menyampaikan bahwa pengembangan wisata tersebut mulai berjalan dan beroperasi sekitar tahun 2021. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa “pengembangan wisata ini di mulai sekitar tahun 2020 waktu masa COVID, lalu mulai beroperasi sekitar tahun 2021.” (Firman Djuda, wawancara 2026).



**Gambar 1.** Sungai Danum Bahandang.  
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026).



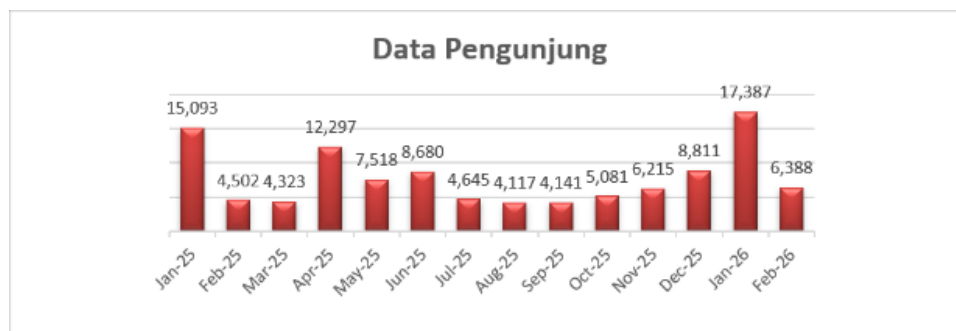
**Gambar 2.** Area Camp.  
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026).



**Gambar 3.** Area Kuliner.  
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026).

Pengelola juga menyampaikan “wisata ini di bangun spontan saja tanpa permohonan izin dari pemerintah, karena dianggap rumit, jadi pihak kecamatan menyampaikan bahwa tidak perlu menggunakan surat resmi dan cukup dengan persetujuan di tingkat kecamatan.” (Firman Djuda, wawancara 2026)

Hingga saat ini, kawasan wisata Danum Bahandang telah berkembang dengan mengusung konsep ekowisata (*eco-tourism*) sebagai upaya pelestarian lingkungan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lahan gambut. Kawasan wisata ini semakin dikenal luas dan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah pengunjung pada periode tahun 2025 hingga 2026 yang mengalami peningkatan, sehingga mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap kawasan wisata tersebut terus berkembang.



**Gambar 4.** Data Pengunjung.  
(Sumber: Data Hasil Lapangan, 2026).

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danum Bahandang memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengelola, warga setempat telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung operasional destinasi wisata. Bentuk keterlibatan tersebut antara lain menjalankan usaha perdagangan di area wisata, membantu pengelolaan tiket masuk, serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban kawasan. Keterlibatan masyarakat pada berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa keberadaan destinasi wisata telah menciptakan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Melalui partisipasi dalam kegiatan operasional, masyarakat memperoleh manfaat secara langsung dari perkembangan sektor pariwisata, baik dalam bentuk tambahan pendapatan maupun kesempatan kerja yang tersedia di kawasan wisata. Fenomena ini mengindikasikan adanya hubungan yang saling mendukung antara pengembangan ekowisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kehadiran wisatawan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga membuka ruang bagi warga untuk berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan operasional destinasi.

Namun, keterlibatan masyarakat lokal dalam kawasan wisata tersebut masih cenderung terbatas pada aktivitas operasional di lapangan, seperti membantu kegiatan pelayanan wisata, menjaga kebersihan kawasan, maupun terlibat dalam aktivitas ekonomi sederhana di sekitar objek wisata. Partisipasi yang dilakukan belum menunjukkan adanya keterlibatan yang lebih mendalam dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan kawasan wisata. Masyarakat belum diberikan ruang yang cukup untuk ikut menentukan kebijakan, perencanaan program, maupun evaluasi pengelolaan wisata secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh bentuk partisipasi yang bersifat pasif. Peran yang dijalankan warga umumnya terbatas pada pelaksanaan kegiatan operasional yang telah ditetapkan, sementara keterlibatan dalam proses perencanaan, pengelolaan, maupun pengambilan keputusan strategis masih relatif terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menempati posisi sebagai aktor utama dalam tata kelola kawasan wisata, melainkan lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana berbagai aktivitas yang mendukung operasional destinasi. Dalam perspektif partisipasi pembangunan, keterlibatan yang hanya berfokus pada tahap implementasi belum mencerminkan partisipasi yang substantif.

Masyarakat belum memiliki ruang yang cukup untuk memengaruhi arah pengembangan kawasan maupun menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi. Akibatnya, berbagai pengetahuan, pengalaman, dan aspirasi yang dimiliki warga

setempat belum terintegrasi secara optimal dalam proses pengelolaan. Padahal, kehadiran masyarakat dalam aspek pengelolaan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ekowisata berkelanjutan. Sebagai kelompok yang hidup dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar, warga memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik ekologis, kondisi sosial, serta potensi yang dimiliki kawasan wisata.

Pengetahuan lokal tersebut merupakan sumber daya yang bernilai dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memastikan bahwa pengembangan destinasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan wisata. Keterlibatan yang lebih luas pada tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program dapat memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi serta mendorong terciptanya tata kelola yang lebih inklusif.

**Tabel 1.** Tingkat Partisipasi Masyarakat

Aspek	Bentuk Partisipasi	Indikator Temuan	Tingkat Partisipasi
Operasional	Keterlibatan dalam pengelolaan kegiatan wisata	Pemeliharaan kebersihan kawasan, pengelolaan fasilitas wisata	Tinggi
Ekonomi	Pemanfaatan peluang	Usaha warung dan jasa wisata oleh masyarakat	Tinggi
Perencanaan	Penyampaian aspirasi	Pemberian saran terkait pengembangan fasilitas	Rendah
Pengambilan Keputusan	Keterlibatan dalam penentuan kebijakan	Tidak terlibat secara langsung dalam keputusan strategis	Sangat Rendah
Evaluasi	Keterlibatan dalam monitoring	Partisipasi dalam pelaporan data pengunjung	Sedang

(Sumber: Hasil Penelitian, 2026).

Jika ditinjau melalui kerangka *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), kondisi tersebut mengarah pada kategori *tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi yang menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan, namun belum memiliki pengaruh yang memadai terhadap proses penentuan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Pada posisi ini, warga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi ruang yang tersedia masih terbatas sehingga keterlibatan mereka belum mampu mengubah atau menentukan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengelola. Karakteristik *tokenism* tercermin dari keterlibatan masyarakat yang lebih banyak berfokus pada pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Meskipun masyarakat telah berkontribusi dalam mendukung keberlangsungan kawasan wisata, peran tersebut belum disertai dengan kewenangan yang cukup untuk memengaruhi proses perencanaan, penyusunan program, maupun penetapan strategi pengelolaan. Dengan demikian, partisipasi yang terjadi cenderung

bersifat konsultatif atau simbolis dibandingkan *partisipatif* secara substantif. Kondisi tersebut berbeda dengan kategori yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi Arnstein, seperti *partnership* dan *citizen control*.

Pada tingkat *partnership*, masyarakat dan pengelola memiliki posisi yang lebih setara dalam merumuskan kebijakan serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan kawasan. Sementara itu, pada tingkat *citizen control*, masyarakat memperoleh kewenangan yang lebih dominan dalam menentukan arah pengelolaan dan pengembangan kawasan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan mereka. Fenomena serupa juga banyak ditemukan dalam berbagai kajian mengenai pengelolaan kawasan wisata maupun sumber daya lingkungan. Keterlibatan masyarakat sering kali terpusat pada tahap implementasi program, sedangkan kesempatan untuk berkontribusi dalam perencanaan, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan masih relatif terbatas. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa proses pengelolaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis. Akibatnya, potensi pengetahuan lokal, pengalaman masyarakat, serta aspirasi yang berkembang di tingkat komunitas belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat di sekitar kawasan wisata memiliki potensi dan kepentingan langsung terhadap keberlanjutan kawasan tersebut, posisi mereka dalam struktur pengelolaan masih terbatas. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dominasi pihak pengelola atau pemerintah dalam pengambilan keputusan, kurangnya akses informasi bagi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas masyarakat dalam manajemen pariwisata. Akibatnya, masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan tanpa memiliki kesempatan untuk menentukan arah pengembangan kawasan wisata tersebut.

Berdasarkan interpretasi menggunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata di Danum Bahandang masih menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif terbatas. Meskipun masyarakat telah berperan dalam berbagai aktivitas yang mendukung operasional kawasan wisata, ruang keterlibatan yang tersedia belum mencakup aspek-aspek strategis yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan penentuan kebijakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi masyarakat masih terkonsentrasi pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti mendukung pelayanan wisata dan menjaga keberlangsungan aktivitas operasional kawasan. Sementara itu, kesempatan untuk terlibat dalam proses yang menentukan arah pengembangan destinasi masih belum terbuka secara optimal. Akibatnya, masyarakat belum memiliki

pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata di kawasan tersebut masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipasi masyarakat secara menyeluruh, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan kawasan wisata tersebut.

Dalam pembangunan berbasis masyarakat, partisipasi menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, kualitas partisipasi mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan. Menurut Sherry R. Arnstein, partisipasi masyarakat berada pada berbagai tingkatan, mulai dari keterlibatan yang bersifat simbolis hingga pemberian kewenangan yang memungkinkan masyarakat memengaruhi kebijakan secara nyata. Konsep ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat dalam suatu program belum tentu mencerminkan partisipasi yang substansial apabila mereka tidak memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan ekowisata, tingkat keterlibatan masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana masyarakat lokal berperan dalam pengelolaan kawasan wisata. Semakin besar ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengelolaan, semakin besar pula peluang terciptanya pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.

Dalam pengelolaan ekowisata Danum Bahandang, partisipasi masyarakat lokal masih menunjukkan keterlibatan yang terbatas. Masyarakat umumnya hanya terlibat dalam kegiatan operasional di lapangan, seperti membantu aktivitas wisata atau mendukung kegiatan yang berlangsung di kawasan tersebut. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dalam aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan masih tergolong rendah. Peran yang dijalankan masyarakat lebih banyak terbatas pada pelaksanaan kegiatan dibandingkan keterlibatan dalam proses yang bersifat strategis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki posisi yang kuat dalam tata kelola kawasan wisata. Jika ditinjau melalui perspektif partisipasi masyarakat, fenomena ini mengindikasikan bahwa keterlibatan warga masih berada pada tingkat yang terbatas. Meskipun telah dilibatkan dalam berbagai aktivitas pengelolaan, pengaruh masyarakat terhadap penentuan kebijakan dan arah

pengembangan kawasan masih relatif kecil. Beberapa faktor dapat memengaruhi kondisi partisipasi masyarakat tersebut:

- a. Faktor aspek kelembagaan dalam pengelolaan kawasan pribadi.
- b. Faktor akses masyarakat terhadap proses pengambilan Keputusan.
- c. Faktor komunikasi dan transparansi informasi antara pengelola dan Masyarakat.
- d. Faktor kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- e. Faktor manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata masih menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif terbatas. Peran masyarakat belum terdistribusi secara merata pada seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterlibatan warga masih belum berlangsung secara komprehensif sehingga peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menentukan arah pengelolaan kawasan wisata masih perlu ditingkatkan. Masyarakat pada umumnya hanya terlibat pada kegiatan yang bersifat operasional dan ekonomi, seperti berdagang di area wisata, menyediakan jasa parkir, menjaga kebersihan lingkungan, maupun membantu aktivitas wisata lainnya.

Keterbatasan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam maupun luar komunitas. Dari sisi internal, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengelolaan kawasan wisata menjadi salah satu hambatan utama. Sebagian warga masih memandang bahwa tanggung jawab pengelolaan destinasi berada pada pemerintah atau pihak pengelola, sehingga peran mereka lebih banyak terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. Persepsi tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses yang lebih strategis, seperti perencanaan dan pengambilan keputusan, belum berkembang secara optimal. Selain itu, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pengalaman dalam pengelolaan pariwisata juga mempengaruhi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan wisata.

Sementara itu, dari sisi eksternal, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak pengelola wisata, pemerintah, dan masyarakat turut menjadi faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal. Masyarakat masih jarang dilibatkan dalam kegiatan musyawarah, sosialisasi, maupun proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan wisata. Akibatnya, masyarakat merasa kurang memiliki peran penting dalam pengembangan wisata dan hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari kegiatan wisata tersebut. Kurangnya program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta

dukungan dalam pengembangan usaha lokal juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Terlepas dari keterbatasan partisipasi yang ada, keberadaan kawasan wisata telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Aktivitas pariwisata menciptakan berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan warga untuk menambah pendapatan dan memperluas sumber mata pencaharian. Beragam kegiatan ekonomi berkembang di sekitar kawasan, seperti penjualan makanan dan minuman, suvenir, serta penyediaan layanan yang dibutuhkan wisatawan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kapasitas yang besar dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Manfaat yang dihasilkan tidak hanya berupa tambahan pendapatan, tetapi juga terciptanya kesempatan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di tingkat komunitas.

Namun demikian, apabila partisipasi masyarakat masih terbatas hanya pada aspek ekonomi tanpa adanya keterlibatan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, maka pengembangan kawasan wisata akan sulit berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan keterlibatan masyarakat memerlukan upaya yang terarah melalui penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan wisata perlu ditingkatkan agar warga memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap manfaat dan tanggung jawab yang melekat dalam pengembangan kawasan wisata. Penguatan kapasitas masyarakat juga menjadi langkah penting melalui pelatihan dan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan aktivitas pariwisata. Dengan kapasitas yang memadai, masyarakat akan lebih siap untuk berkontribusi tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga dalam proses pengelolaan yang lebih strategis. Di samping itu, pengembangan wisata perlu didukung melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, pengelola wisata, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Sinergi antar aktor tersebut dapat memperkuat tata kelola destinasi, memperluas partisipasi masyarakat, serta mendorong pengembangan wisata yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Danum Bahandang, Kota Palangka Raya, masih terbatas pada keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Masyarakat belum berperan secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, maupun penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat terhadap arah pengelolaan destinasi masih relatif rendah, sehingga posisi mereka lebih dominan sebagai pelaksana kegiatan daripada sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan kerangka *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), tingkat keterlibatan tersebut dapat dikategorikan pada level *tokenism*. Pada kategori ini, masyarakat telah memperoleh ruang untuk terlibat dalam berbagai aktivitas wisata, namun keterlibatan tersebut belum diikuti oleh kewenangan yang memadai untuk memengaruhi kebijakan atau menentukan arah pengembangan kawasan. Dengan demikian, partisipasi yang terjadi masih bersifat terbatas dan belum mencerminkan keterlibatan yang substantif dalam tata kelola ekowisata.

Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya komunikasi dan transparansi informasi antara pengelola dan masyarakat, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat lokal. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata belum berjalan secara menyeluruh dan partisipatif.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan motivasi selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Ibu Fitriana Selvia selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan pendampingan akademik selama proses penyusunan artikel ini. Bimbingan yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam penyempurnaan penelitian hingga tahap publikasi.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Firman Djuda selaku pemilik wisata Danum Bahandang atas kesediaannya menjadi informan penelitian serta memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses pengumpulan data. Dukungan dan keterbukaan yang diberikan sangat membantu kelancaran pelaksanaan penelitian di lokasi studi.

Akhirnya, penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan, serta menjadi referensi bagi penelitian dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

**DAFTAR REFERENSI**

- Alemayehu, S., & Esubalew, B. (2024). Community participation in ecotourism project development: In Wof-Washa National Priority Forest Area. *Journal of Social Responsibility, Tourism and Hospitality*, 4(5), 9–22. <https://doi.org/10.55529/jsrth.45.9.22>
- Alfitri, Kholek, A., & Santoso, A. D. (2023). Determinants and influences of community participation and support of ecotourism villages to economic, social, and tourism development: A study in Padang Bindu Village, Indonesia. *International Journal of Tourism Policy*, 13(5), 444–462. <https://doi.org/10.1504/IJTP.2023.133200>
- Annas, F. B., Lubis, D. P., Hapsari, D. R., & Sumardjo. (2024). Convergence communication in community-based ecotourism management. *Social Science and Humanities Journal*, 8(7), 4270–4283. <https://doi.org/10.18535/sshj.v8i07.1193>
- Dubale, S. A., & Esubalew, B. (2024). Opportunities and challenges of community participation in community-based ecotourism development in Wof-Washa Forest Area. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 8(2). <https://doi.org/10.34013/jk.v8i2.1650>
- Ginting, N., Munazirah, & Wahid, J. (2023). Community participation in sustainable tourism: A case study in Balige, Indonesia. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 8(23), 239–246. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v8i23.4509>
- Guerrero-Moreno, M. A., & Oliveira-Junior, J. M. B. (2024). Approaches, trends, and gaps in community-based ecotourism research: A bibliometric analysis of publications between 2002 and 2022. *Sustainability*, 16(7), Article 2639. <https://doi.org/10.3390/su16072639>
- Juliana, Sihombing, S. O., & Suwu, S. E. (2023). Community-based ecotourism in Sawarna Tourism Village. *Enrichment: Journal of Management*, 13(1), 258–269. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i1.1192>
- Kia, Z. (2021). Ecotourism in Indonesia: Local community involvement and the affecting factors. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.10789>
- Komber, L. L. S., Situmoran, E. R., Aninam, J., & Wurarah, R. N. (2024). Community participation in the utilization of Mansinam Island as an ecotourism object. *Jurnal Bisnis Kehutanan dan Lingkungan*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/jbkl.v1i2.2024.391>
- Novianty, E., Rahmanita, M., & Nurbaeti. (2025). The influence of community participation in sustainable tourism management at local destinations: A bibliometric analysis. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1). <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.523>
- Pereira, N. A. A., Arief, H., Hermawan, R., & Sudradjat, A. (2023). Empowerment of the community of Cisantana as a buffer village of Gunung Ciremai National Park through ecotourism program. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 13(1), 156–167. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.1.156-167>
- Pujar, S. C., & Mishra, N. R. (2024). Delivering sustainable livelihoods to indigenous communities through ecotourism: Insights from Western Odisha, India. *International Journal of Tourism Anthropology*, 9(3), 181–200. <https://doi.org/10.1504/IJTA.2024.138898>

- SeoYeon, A., & HyeMin, P. (2023). Factors driving community engagement through social capital formation focusing on community-based eco-tourism in Dongbaek Village, Jeju, Korea. *International Journal of Global Environmental Issues*, 22(4), 355–374. <https://doi.org/10.1504/IJGENVI.2023.136294>
- Suhandi, A. S., Novianti, E., Oktavia, D., Khan, A. M. A., & Simatupang, W. P. (2022). Community participation process in community-based tourism development in Waerebo Traditional Village, Manggarai Regency, Flores. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 20(2). <https://doi.org/10.5614/ajht.2022.20.2.05>
- Utama, I. G. B. R., Junaedi, I. W. R., & Krismawintari, N. P. D. (2024). Determinants of community participation in ecotourism programs in Bali, Indonesia. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 13(2), 260–268. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp260-268>
- Utama, I. G. B. R., Laba, I. N., Junaedi, I. W. R., Krismawintari, N. P. D., Turker, S. B., & Juliana. (2021). Exploring key indicators of community involvement in ecotourism management. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(3), 754–764. [https://doi.org/10.14505/jemt.v12.3\(51\).20](https://doi.org/10.14505/jemt.v12.3(51).20)
- Utama, I. G. B. R., Trimurti, C. P., Junaedi, I. W. R., & Krismawintari, N. P. D. (2024). Concept of participation model in community-based ecotourism programs adjacent to conservation forests. *Journal of Management World*, 2024(4), 243–253. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.371>
- Wardani, P. A., Rahmanita, M., Farhan, M., & Pramudita, R. F. (2023). Community participation in tourism destination development: Lesson from Kelor Tourism Village. *Journal of Language, Communication, and Tourism*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.25047/jlct.v1i2.3987>
- Wawo, M., Tetelepta, J. M. S., Ayal, F. W., Mamesah, J. A. B., Rahman, & Hehakaya, T. B. (2025). The participation level of the local community towards community-based tourism development in Sopapei Tourism Destination, Ambon, Indonesia. *Media Konservasi*, 30(1), 96–105. <https://doi.org/10.29244/medkon.30.1.96>
- Yuniastoeti, V., & Rahmafritria, F. (2024). Analyzing local community participation and barriers in tourism village development: A case study of Mekarlaksana Village. *Spatial Planning & Management Science*, 1(2).